

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di Indonesia pemilihan umum atau pemilu merupakan implementasi konkret dari sistem demokrasi, yang berfungsi sebagai alat bagi warga negara untuk mengekspresikan kedaulatan rakyat terhadap negara dan pemerintah. Proses pemilu ini didasarkan pada nilai-nilai pada Pancasila dan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Partisipasi politik dalam suatu negara demokratis adalah sebuah tolok ukur yang menunjukkan realisasi dari pemberian wewenang tertinggi negara oleh rakyat (kedaulatan rakyat). Hal ini terwujud melalui partisipasi aktif peserta pemilu dalam proses demokratis, yang mencerminkan tingkat partisipasi, pemahaman, dan keterlibatan individu dalam urusan negara. Tingkat partisipasi politik yang semakin tinggi menandakan tingkat keterlibatan yang lebih besar dalam pesta demokrasi atau pemilu. Sebaliknya, jika tingkat partisipasi politik rendah seringkali mencerminkan kurangnya minat individu terhadap urusan atau aktivitas Negara (Soebagio dalam Suharyanti, 2020)

Pemilihan umum merupakan alat demokrasi yang mewakili ekspresi kedaulatan rakyat, hal ini bertujuan untuk memilih wakil dan pemimpin yang memiliki aspirasi, kualitas, serta tanggung jawab dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Salah satu kelompok pemilih yang menarik untuk dikaji lebih lanjut adalah pemilih pemula, yang merupakan individu yang untuk pertama kalinya akan berpartisipasi dalam pemilihan umum. Seperti yang dijelaskan dalam Modul I Pemilu untuk pemilih pemula yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Tahun 2010, kategori pemilih merujuk pada Warga Negara Indonesia (WNI) yang baru mencapai usia 17 tahun atau yang belum mencapai usia 17 tahun tetapi telah menikah (Wardhani, 2018). Pemilu yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 untuk pemilihan presiden, pemilihan legislatif, dan pemilihan kepala daerah. Setiap pagelaran Pemilu, dibutuhkan dan diwajibkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak suaranya, adanya partisipasi ini dianggap

sebagai bentuk penggunaan hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam menggunakan hak suaranya untuk memilih. Menurut Undang-undang pasal 2 No. 7 Tahun 2017 menjelaskan asas pemilu sebagai prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, yang dikenal sebagai *luber dan jurdil*. Asas “Luber” yang merupakan singkatan dari “Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia” telah ada sejak zaman Orde Baru. Selanjutnya, di era reformasi, muncul juga asas “Jurdil” yang merupakan singkatan dari “Jujur dan Adil”. Asas ini tentunya merupakan pegangan untuk mewujudkan Pemilu dengan prinsip-prinsip yang diharapkan oleh masyarakat (Sari, 2023).

Peran generasi muda dalam perhelatan pemilu tentu sangat menentukan arah demokrasi dan kemajuan bangsa. Dewasa ini, pembahasan khususnya para pihak pemangku (*stakeholder*) tidak bisa lepas dari fenomena pemilih pemula. Dilansir dalam bakesbangpol.surabaya.go.id, berdasarkan Berita acara Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor : 104/PL.01.2-BA/3578/2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kota Surabaya Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 21 Juni 2023. Daftar Pemilih di Kota Surabaya berjumlah sebanyak 2.218.586, didominasi oleh kelompok generasi Milenial dan Generasi Z. Tercatat bahwa pemilih yang termasuk kalangan dari generasi milenial sebanyak 717,3 ribu atau 32,3 persen dan pemilih di kalangan generasi Z sebanyak 466,1 ribu atau 21 persen. Hal ini menandakan bahwa pada pemilu 2024 di Kota Surabaya nanti didominasi oleh generasi muda atau pemilih pemula. Namun, menjadi pemilih dalam pemilihan umum belum dapat dirasakan oleh sebagian besar pemilih khususnya pemilih pemula. Jumlah pemilih pemula seperti yang disebutkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya memiliki potensi, hal tersebut disebabkan tersebarnya pemilih pemula dengan berbagai dinamika dan budaya yang diterapkan pada lingkungannya.

Terdapat beberapa hal yang perlu dipersiapkan oleh pemilih pemula sebelum pemilihan umum, di antaranya memastikan diri telah terdaftar sebagai pemilih, mengenali setiap figur atau pasangan yang mencalonkan diri, mencermati program, gagasan, hingga latar belakang calon dan memilih secara objektif tanpa adanya paksaan atau sogokan. Pemilih pemula merujuk kepada individu yang

berusia antara 17 hingga 21 tahun dan akan mengambil bagian dalam proses politik, khususnya dalam pemilihan umum, untuk kali pertama (Shela & Kharisma, 2023). Dengan demikian seseorang dapat dikatakan pemilih pemula untuk individu yang berusia 17 tahun pada saat hari pencoblosan dan belum pernah memilih dalam pemilihan umum.

Pirie & Worcester, Haste dan Hogan (dalam Morrisan, 2016) pemilih pemula tergolong dalam kelompok yang tidak peduli dan tidak tahu mengenai politik. Kertati (2018) pemilih pemula selalu menjadi incaran partai politik hal tersebut dikarenakan sikap pemilih pemula yang cenderung labil dan mudah untuk dipengaruhi oleh faktor lingkungan sosial. Karim dalam Kertati (2018) memandang pemilih pemula yang sebagian besar pemuda merupakan kaum yang sulit untuk didikte, bahkan sulit didekati oleh partai politik. Hal ini sejalan dengan Rahmatika (dalam Putri & Akhrani, 2019) pemilih pemula merupakan salah satu segmen unik dalam partisipasi politik, karena subjek memiliki tingkat keingintahuan yang tinggi dan antusias terhadap politik, namun kurang rasional dalam ikut serta dalam kegiatan politik. Meskipun lingkungan politik semakin terbuka, partisipasi politik generasi muda tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Bagi kalangan muda, politik sering dianggap terlalu formal, bahkan sebagian dari pemilih pemula enggan untuk membahasnya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) berencana menumbuhkan kesadaran pemilih pemula untuk berpartisipasi aktif dengan melakukan program berupa sosialisasi dan pendidikan pemilih. Pemilih pemula harus menyadari akan pentingnya hak pilih, memperhatikan dan menelusuri latar belakang calon legislatif dan calon presiden, memahami visi, misi, dan program kerja yang diangkat, serta menghindari berita *hoax* terkait pemilihan umum. Pemanfaatan media sosial sebagai alat komunikasi dalam pemilihan umum di Indonesia telah menyebabkan munculnya fanatisme yang berlebihan. Seperti halnya kampanye di platform jejaring sosial tidak hanya berfokus pada penyebaran visi, misi, dan program para kandidat kepada masyarakat, melainkan juga mencakup konten yang merendahkan calon lainnya. Kampanye semacam itu cenderung melibatkan upaya penghinaan atau pencemaran nama baik dengan menggunakan isu-isu yang

tidak memiliki dasar yang kuat (Ismaya & Sugiyantica, 2014).

Turner (2015) menggambarkan Generasi Z sebagai generasi *digital native* dan secara alami memiliki keterampilan digital yang mereka manfaatkan untuk aktif terlibat dalam partisipasi politik. Generasi Z menunjukkan beragam aktivitas di media sosial, termasuk membaca postingan terkait pemilihan umum, membaca artikel berita atau informasi lainnya seperti opini yang berkaitan dengan pemilihan umum, membaca komentar terkait pemilu, menonton video yang terkait dengan pemilu, dan mengunjungi halaman atau profil politisi atau tokoh masyarakat dalam konteks pemilihan umum. Partisipasi politik dalam media sosial dapat dengan mudah membagikan informasi, menyebarkan kegiatan yang terkait dengan pemilu, atau mengajak orang untuk terlibat dalam konteks pemilihan umum. Hal ini melibatkan ekspresi niat atau indikasi untuk hadir atau menunjukkan minat pada acara yang terkait dengan pemilu di media sosial (Harsono, 2023).

Partisipasi menurut Tjokrowinoto (dalam Novitasari, 2017) partisipasi merupakan keterlibatan mental, emosi, dan perilaku seseorang yang berinisiatif terhadap suatu kegiatan yang diadakan oleh suatu organisasi, serta mendukung sebuah pencapaian tujuan dan bertanggung jawab atas keterlibatannya. Surbakti (dalam Seli, 2019) Partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara dalam mengambil keputusan pemerintahan yang bersangkutan dan memiliki pengaruh pada hidupnya. Hal ini kerap dianggap sepele bagi beberapa orang sehingga hak untuk memilih ini boleh digunakan atau tidak. Disimpulkan bahwa partisipasi aktif merupakan suatu keterlibatan baik secara mental, fisik, maupun emosi terhadap suatu kegiatan atau aktivitas yang dilaksanakan dan mampu mempertanggungjawabkan keterlibatannya. Namun, Tingkat partisipasi pemilih pemula dalam pemilu di Indonesia masih tergolong rendah. Pemilih pemula adalah warga negara yang baru memenuhi syarat untuk memilih dan belum pernah menggunakan hak pilihnya sebelumnya. Padahal peran pemilih pemula memiliki dampak signifikan dalam membentuk arah masa depan negara.

Keterlibatan pemilih pemula dalam pemilihan umum merupakan suatu hal yang penting, keterlibatan memberikan dampak yang baik bagi masa depan suatu bangsa. Coryanata (2014) Keterlibatan Masyarakat merupakan peran serta atau

keikutsertaan seseorang secara perseorangan atau berkelompok dalam suatu kegiatan, pendekatan dalam partisipasi masyarakat adalah adanya keterlibatan langsung masyarakat dalam proses pembangunan. Gusmadi (2017) keterlibatan masyarakat merupakan salah satu bentuk keikutsertaan masyarakat dalam kehidupan bersama untuk mendukung tujuan bersama dan senantiasa berinteraksi dengan masyarakat serta mempunyai rasa tanggung jawab dalam keberlangsungan kehidupan masyarakat. Zhafira & Choiriyah (2022) keterlibatan masyarakat merupakan keikutsertaan masyarakat dalam suatu kegiatan tertentu yang berdampak pada pencapaian kepentingan bersama. Keterlibatan masyarakat memiliki pengaruh yang besar terhadap keberlanjutan suatu daerah. Keterlibatan masyarakat ini menunjukkan dukungan masyarakat dalam menciptakan program suatu negara bukan hanya mendukung program suatu negara.

Hoefler (2021) keterlibatan masyarakat menunjukkan keikutsertaan seorang individu kepada suatu daerah atau lingkungan. Keterlibatan dan partisipasi terhadap politik mencakup beberapa aspek yakni sumber daya (waktu, uang, keterampilan), keterlibatan psikologis (minat politik, informasi politik, rasa politik, keberpihakan, dan pengaruh keluarga), dan jaringan rekrutmen (koneksi dengan orang-orang yang sudah terlibat). Keterlibatan masyarakat atau pemilih pemula sebagai suatu kesatuan yang diwujudkan melalui proses pemberian suara dalam pemilihan umum, ikut serta dalam kampanye atau menjadi anggota partai politik. Partisipasi seperti ini merupakan suatu tanda permulaan tumbuhnya masyarakat yang mampu berkembang secara mandiri dan memiliki integritas dalam pemilihan umum nantinya. Jadi dapat diartikan bahwa partisipasi politik adalah keterlibatan masyarakat dalam aktivitas yang dilakukan kelompok pada kehidupan sosial dan politik.

Keterlibatan partisipasi aktif pemilih pemula dalam proses pemilihan umum menjadi suatu hal yang penting. Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas periode Januari 2023 yang menekankan fokus kepada Generasi Z, yang menyatakan antusiasme generasi Z dalam partisipasi politik berada diangka 67,8% (Nugraheny & Prabowo, 2023). Hal ini didukung oleh data *preliminary research* yang telah dilakukan oleh peneliti pada pemilih pemula sebanyak 56 responden.

Data yang didapatkan adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1 Hasil *Preliminary* Minat Pemilih Pemula

Berdasarkan hasil *preliminary* dapat dilihat bahwa sebanyak 92,9% pemilih pemula menyatakan bersedia berpartisipasi dalam pemilihan umum dan sebanyak 7,1% pemilih pemula menyatakan tidak bersedia berpartisipasi dalam pemilihan umum. Responden tersebut menjelaskan alasan mengapa tidak bersedia berpartisipasi dalam pemilihan umum seperti tidak memahami prosedur pemilu, menganggap bahwa siapapun yang akan terpilih tidak akan membawa perubahan, bahkan visi misi calon tidak sesuai dengan ketika menjabat. sehingga responden memilih untuk tidak menggunakan hak pilih. Hal ini juga didukung oleh wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 28 Oktober 2023 terkait keterlibatan pemilih pemula pada pemilu. Subjek *preliminary* peneliti adalah tiga pemilih pemula yang tinggal di Kota Surabaya, hasil *preliminary* yang peneliti peroleh adalah sebagai berikut:

“jujur aja ya mass, emang sekarang temen-temenku sering bicarain politik-politik yang aku gak paham. Tapi temenku ada yang bilang kalau mending milih pasangan calon xxx karena emang bakal bagus kinerjanya. Di satu sisi aku tertarik buat milih pasangan calon itu mas, tapi lohh kadang visi sama misi yang diucap, beda sama kinerjanya nanti. Jadi disisi lain aku juga

pengen golput aja, karena emang ga seberapa penting nanti siapa yang bakal jadi”

(Subjek A, 18 Tahun)

Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek, A merasa terlibat terhadap partisipasi politik berupa ketertarikannya dalam memilih pasangan calon, hal tersebut terjadi karena teman – teman dan lingkungan sosial subjek A menyatakan pilihannya. Pernyataan A memenuhi aspek keterlibatan yaitu jejaring (Hoefer, 2021). Hal tersebut terjadi karena subjek A merasakan adanya lingkup pertemanan yang kerap membahas isu – isu dalam pemilihan umum. Hal ini didukung oleh wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 15 Desember 2023 yang didapati sebagai berikut:

“nggak terlalu penting juga si mas, kalo dari saya sendiri ikut atau nggak ikut juga. Suara saya nggak mempengaruhi hasil yang diinginkan. Kemarin aku sempet lihat debat capres itu, janjinya panjang lebar. Tapi, belum tentu juga setelah di pilih program yang dijanjikan terealisasi kan mas..”

(Subjek L, 21 Tahun)

Berdasarkan hasil wawancara, dengan subjek L menjelaskan bahwa subjek L mengikuti informasi yang ditayangkan di media pemberitaan hal tersebut memenuhi aspek keterlibatan psikologis, dimana subjek L memiliki antusiasme terhadap politik khususnya pemilihan umum yang subjek L ikuti melalui media – media kabar (Hoefer, 2021).

Dalam konteks pemilu, salah satunya yang menarik perhatian yaitu fenomena politik uang, yang kerap kali dilakukan oleh tim atau kandidat dalam kampanye tertentu dengan membeli suara rakyat. Riyanto dalam Bawaslu (2021) bahwa politik uang selalu menjadi perbincangan yang hangat di berbagai kalangan, seperti yang dibahas oleh tokoh pengamat politik, akademisi, aktivis pemilu, aktivis anti korupsi, dan dalam berbagai acara yang diselenggarakan oleh lembaga penyelenggara pemilu. Topik ini juga menjadi perhatian dalam kegiatan organisasi, termasuk organisasi masyarakat (ormas) atau lembaga swadaya masyarakat. Bahkan, obrolan masyarakat di warung kopi atau angkringan pun

sering kali mencakup topik politik uang, terutama pada periode penyelenggaraan pemilu atau pilkada. Dalam survei yang dilakukan oleh Direktorat Penelitian dan Pengembangan (2013) menjelaskan kurangnya integritas dalam konteks pemilihan umum masih menjadi permasalahan yang belum teratasi. Integritas dalam pemilu melibatkan dua tingkatan, yakni dari pihak pemilih dan politisi. Apabila pemilih memiliki integritas, mereka akan memilih calon presiden, wakil presiden, dan anggota legislatif tanpa terlibat dalam praktik politik uang. Demikian pula, politisi yang berintegritas tidak akan menggunakan metode-metode yang melanggar aturan untuk memperoleh suara dalam pemilu (Muhtadi, 2019).

Secara umum, politik uang dapat diartikan sebagai strategi mobilisasi dalam konteks pemilihan umum yang melibatkan pemberian uang, hadiah, atau barang kepada pemilih dengan tujuan agar mereka memilih calon tertentu dalam pemilu. Muhtadi (2019) beberapa penelitian mengacu pada politik uang dalam kerangka teori distribusi politik yang dapat dibagi menjadi dua bentuk. Pertama adalah politik uang yang terutama terkait dengan taktik perorangan dalam jual-beli suara, yang sering terjadi menjelang pemilihan dan dikenal dengan istilah "serangan fajar." Tindakan ini bisa dilakukan dengan pembayaran sebelum hari pemilihan atau dalam bentuk prabayar, serta terkadang dilakukan pascabayar setelah dukungan diberikan. Kedua, melibatkan strategi politik uang grosiran yang bersifat kolektif dan berfokus pada jangka panjang, mencakup penyalahgunaan kebijakan programatik seperti bantuan sosial atau hibah penelitian ini juga didukung oleh wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 21 Oktober 2023 terkait praktik politik uang. Subjek *preliminary* peneliti adalah ketua organisasi X di Surabaya, hasil *preliminary* yang peneliti peroleh adalah sebagai berikut:

“kemarin aku dikasih tawaran dari partai Y untuk mengadakan sosialisasi Partai Y di Organisasiku Cak, lumayan eh kalau tak sanggupi dapete 12 Juta masuk kantong pribadi hahaha ”

(Subjek S, Ketua Organisasi X)

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada subjek S, peneliti menemukan adanya praktik politik uang yang masih dilakukan oleh tim partai

politik dalam pemilihan umum. Perbedaan antara pemilih pemula dan kelompok lainnya terletak pada kurangnya pengalaman politik dalam menghadapi pemilihan umum, sehingga dasar pertimbangan dalam menentukan pilihan cenderung tidak mantap, tidak stabil, atau mudah berubah-ubah sejalan dengan informasi atau preferensi yang mereka terima. Pemilih pemula cukup rentan terhadap pengaruh dari kepentingan-kepentingan tertentu, terutama dari orang-orang terdekat seperti keluarga, mulai dari orang tua hingga kerabat dan teman. Media massa juga memiliki peran yang signifikan dalam memengaruhi pilihan pemilih pemula. (Astreawan, 2022).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemilih pemula menunjukkan keterlibatan dalam pemilihan umum. Hal ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Syahri (2013) memandang bahwa kegiatan partisipasi warga negara dalam pelatihan bagi masyarakat dapat digerakkan dengan penguatan organisasi. Gusmadi (2017) keterlibatan warga negara menekankan partisipasi dalam pelayanan sukarela kepada masyarakat setempat, baik oleh individu yang bertindak secara independen atau sebagai peserta dalam sebuah kelompok. Nasution et al., (2019) juga menunjukan antusiasme pemilih pemula dengan aktivitas diskusi dan sharing dengan pihak lain, sehingga menjadikan keyakinan pemilih pemula dalam memberikan hak suara pada pemilu. Pendidikan lingkungan tidak hanya digunakan dalam arti sempit pengajaran atau pembelajaran di sekolah formal atau universitas (Hilson, 2018). Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Irwan (2020) menjelaskan keluarga, terutama orang tua memiliki peran penting dalam penyelenggaraan sosialisasi politik, karena menjadi lingkungan awal di mana anak-anak menerima pengarahan politik, terutama sebelum memasuki sekolah.

Didasarkan pada konteksnya keterlibatan, yang merupakan tendensi seseorang untuk ikut serta dalam aktivitas di lingkungan sosialnya. Judul penelitian ini, “Studi Kuantitatif Deskriptif Keterlibatan Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum 2024 Di Kota Surabaya”.

1.2. Batasan Masalah

Penelitian ini membatasi masalah mengenai keterlibatan pemilih pemula dalam pemilihan umum 2024 di Kota Surabaya. Penelitian ini merupakan studi deskriptif kuantitatif pada pemilih pemula dalam pemilihan umum yang memiliki beberapa karakteristik yaitu: variabel yang digunakan keterlibatan, dengan menggunakan sasaran subjek yaitu para pemilih pemula yang baru pertama kali berpartisipasi dalam pemilihan umum dan berada di Surabaya.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diangkat, peneliti menyusun pertanyaan penelitian sebagai berikut: "Bagaimana keterlibatan pemilih pemula yang akan mengikuti Pemilihan Umum 2024 di Kota Surabaya?"

1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara kuantitatif deskriptif keterlibatan pada pemilih pemula dalam konteks pemilihan umum 2024 di Kota Surabaya.

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1. Manfaat Teoritis

Studi ini diharapkan akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep keterlibatan dan bagaimana konsep ini beroperasi dalam konteks partisipasi dalam pemilihan umum di kalangan pemilih pemula. Hal ini akan mengisi kesenjangan pengetahuan dalam literatur tentang keterlibatan secara politik. Di samping itu, penelitian ini dapat menjadi sumbangan berharga terhadap teori psikologi sosial dengan mengembangkan pemahaman tentang pengaruh sosial dan psikologis terhadap perilaku pemilih pemula dalam pemilihan umum.

1.5.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan kepada subjek, pemilih pemula dan partai politik dalam merancang kebijakan yang lebih efektif untuk mendorong partisipasi pemilih pemula.

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis, yaitu :

1. Bagi Pemilih Pemula

Penelitian ini dapat menggambarkan secara kuantitatif deskriptif keterlibatan pada pemilih pemula dalam konteks pemilihan umum 2024 di Kota Surabaya. Sehingga, dapat memberikan pemahaman dasar bagi pemilih pemula dengan lebih baik, serta menyoroti pentingnya pemahaman konsep keterlibatan dan bagaimana pemilih pemula dapat membuat keputusan politik yang lebih rasional.

2. Bagi Partai Politik

Hasil dari penelitian ini memberikan pemahaman kepada partai politik untuk terlibat aktif dengan pemilih pemula, yang dapat memberikan citra positif bagi partai politik. Partai yang dianggap peduli terhadap aspirasi dan kepentingan generasi muda cenderung mendapatkan dukungan dan simpati lebih besar dari masyarakat.

3. Bagi Orang Tua

Bagi orang tua sebagai lingkungan pertama bagi pemilih pemula. Penelitian ini dapat menggambarkan secara kuantitatif deskriptif keterlibatan pada pemilih pemula dalam konteks pemilihan umum 2024 di Kota Surabaya. Maka, memberikan pemahaman bahwa partisipasi aktif masyarakat dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pendidikan demokrasi di kalangan generasi muda atau pemilih pemula.